

**TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TURUT SERTA DALAM
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**
(Studi Kasus Putusan No. 51/Pid.B/2009 /PN.PL)

MOH. HARYONO / D 101 08 100

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya, karena banyak peserta yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindak pidana.

Para pelaku (Pasal 55 Ayat (1) yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana penganiayaan dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis ancaman atau pertanggungjawabannya adalah sama tapi secara keadilan seorang hakim harus menentukan para pelaku tersebut sesuai dengan apa yang dilakukannya atau kapasitas dari masing-masing pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Pada kenyataannya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu.

Kata Kunci : Tindak pidana pembunuhan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian tentang hukum sebagai, “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah”.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan yang ada dalam masyarakat, yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana)

barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.”¹

Dari definisi di atas maka dapat diketahui bahwa hukum pidana dapat melahirkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan dilarang, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.
2. Pidana, yaitu nestapa atau penderitaan yang dibebankan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.
3. Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum pidana.

Ketiga unsur-unsur tersebut merupakan rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga harus selalu ada dalam setiap

¹Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm, 7.

permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana. Dengan demikian dapat dilihat bahwa hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan. Dengan pengaturan hukum yang demikian dapat diketahui perbuatan-perbuatan mana yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela, sehingga perbuatan ini selalu menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat. adanya reaksi seperti ini merupakan salah satu bentuk usaha untuk mencapai tata tertib sosial, dimana reaksi ini akan semakin nampak pada saat ancaman kejahatan ataupun pelanggaran meningkat secara kuantitas dan kualitas.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering muncul dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang atau penyertaan, sering menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktiannya, karena banyak peserta yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut. Dalam praktiknya tindak pidana dapat diselesaikan oleh bergabungnya beberapa orang, yang setiap orang melakukan wujud-wujud tingkah laku tertentu kemudian melahirkan suatu tindak pidana.

Para pelaku (Pasal 55 Ayat (1) yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana penganiayaan dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang secara yuridis ancaman atau pertanggungjawabannya adalah sama tapi secara keadilan seorang hakim harus menentukan para pelaku tersebut sesuai dengan apa yang dilakukannya atau kapasitas dari masing-masing pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau tindak pidana tersebut.

Pada kenyataannya, kadang sulit dan kadang juga mudah untuk menentukan siapa diantara mereka yang perbuatannya benar-benar telah memenuhi rumusan tindak pidana, artinya dari perbuatannya yang melahirkan tindak pidana itu..

Upaya pembuktian sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis.

Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Membuktian dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian. Dalam kaitannya dengan pembuktian dan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang pembuktian

1. Pengertian Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

Menurut Moch Anwar yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para

pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.²

Dijelaskan lebih lanjut oleh Wirdjono Prodjodikoro Pembuktian adalah proses sebelum penjatuhan putusan oleh hakim yang terlebih dahulu memilah-milah, mengkonstantir dan memperinci, terhadap fakta-fakta yang muncul dipersidangan.³

Menurut Soesilo Prajogo, Pembuktian adalah suatu usaha atau upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara di persidangan pengadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.⁴

2. Alat bukti

Dalam pasal 188 KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti ialah ;

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari ;
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Surat;
 - 3) Keterangan terdakwa.
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

B. Deelneming (Penyertaan).

Secara etimologi, kata *deelneming* berasal dari bahasa Belanda "*deelnemen*" yang berarti menyertai, dan kata "*deelneming*" yang dapat diartikan diartikan penyertaan".

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Deelneming atau penyertaan ini dia atur dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 yang berbunyi :

Pasal 55

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

C. Tindak Pidana Pembunuhan.

1. Pengertian Tindak Pidana

"Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut dengan delik. Menurut wujud aslinya atau sifatnya, perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap adil dan baik".⁵

Menurut Wirdjono Prodjodikoro, tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Inonesiaada

²Anwar, H. A. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, 1990, hlm 76.

³Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 43.

⁴Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual Press, Jakarta, 2007, hlm 17.

⁵Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta 1983 hlm 13

istilah dalam bahasa asing, Yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁶

Menurut batasan pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana adalah peristiwa pidana yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan manusia yang pembuatnya diancam pidana.

2. Tindak Pidana Pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP mulai Pasal 338 hingga Pasal 350. Dalam ketentuan pasal tersebut masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 338 KUHP berkaitan dengan pembunuhan biasa, berbunyi,

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dari ketentuan Pasal diatas, dapat dijelaskan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan tersebut sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja.
- 3) Merampas nyawa

D. Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

1. Upaya Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pembunuhan

Pembuktian adalah suatu proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran peristiwa dengan menggunakan bukti-bukti yang diatur oleh undang-undang.

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHP tersebut dijelaskan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor Perkara 51/Pid.B/2009/PN. PL yang menyatakan bahwa terdakwa Hasanuddin Dg. Sikki dan Rikki Dg. Messang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama atas korban Ansar yang pengenaannya telah diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana selama 15 (Lima Belas) Tahun penjara potong masa tahanan.

Hakim Pengadilan Negeri Palu Bpk.Alfian,SH.MH (Wawancara tanggal 17 Februari 2013) menjelaskan,

“Di dalam prakteknya, adalah tidak demikian mudah untuk menyebutkan orang yang mana yang harus dipandang sebagai pelaku dan orang atau orang-orang yang mana yang dapat dipandang sebagai mededader atau sebagai pelaku penyerta, kiranya adalah sangat sulit bagi hakim untuk memastikan, yaitu orang; yang mana sebenarnya merupakan pelakunya dan orang yang mana lagi yang seharusnya dipandang sebagai *pelaku utama* atau sebagai *pelaku-pelaku penyerta*”.⁷

Dalam upaya pembuktian di persidangan, termasuk studi kasus Pengadilan Negeri Palu Nomor Perkara 51/Pid.B/2009/PN.PL yang menghadirkan terdakwa Hasanuddin Dg.Sikki dan Rikki

⁶Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reffika Aditama, Bandung 2003 hlm 55

⁷Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Palu,Bpk Alfian,SH,MH,17 Februari 2013,di Pengadilan Negeri Palu, Jalan Samratulangi No.46

Dg. Messang atas korban Ansar terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama pada Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebelum mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, sesuai ketentuan KUHPidana Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan upaya pembuktian atas kasus tersebut.

Dari posisi kasus yang telah dipaparkan diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Upaya Pembuktian seperti dalam studi kasus diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHPidana yang menjelaskan bahwa :

Alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam upaya pembuktian atas studi kasus yang diajukan penulis dalam penulisan skripsi ini, guna penyampaian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut, persidangan menghadirkan alat bukti yang sah berupa :

1. Keterangan Saksi-saksi,
2. Petunjuk
3. Keterangan Terdakwa

Dalam keterangan saksi di persidangan untuk studi kasus Pembunuhan secara bersama-sama ini termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu dapat dijelaskan penulis secara rinci sebagai berikut :

1. Pembuktian di Persidangan.

Selain menghadirkan saksi-saksi ke depan persidangan untuk diminta keterangannya, untuk lebih memperkuat alat bukti saksi tersebut, persidangan juga mendengarkan keterangan terdakwa guna menyesuaikan dan mempertegas alat bukti saksi tersebut dalam upaya pembuktian kasus tindak pidana

pembunuhan secara bersama-sama tersebut

Di dalam persidangan, keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 188 KUHPidana yaitu “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Adalah suatu hal yang perlu kembali dipertegas bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, oleh sebab itu putusan-putusan pembedaan yang dikeluarkan oleh majelis hakim haruslah melalui pemikiran-pemikiran dan pertimbangan yang merujuk kepada 3 (tiga) tujuan utamanya yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya khususnya bagi terdakwa.

Menjadi hakim merupakan tugas yang cukup berat karena dapat menentukan kehidupan seseorang untuk dapat memperoleh kebebasan ataupun hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akan dapat merenggut nyawa, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan setiap insan, pengambilan keputusan sebagai suatu perumusan berbagai macam alternatif tindakan dalam menghadapi situasi serta menetapkan pilihan yang tepat dari berbagai alternative, ditambahkan oleh beliau bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara memilih salah satu dari berbagai alternative yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu menghasilkan suatu keputusan yang baik untuk mengatasi suatu masalah.

Dari hasil penelitian penulis pada pengadilan Negeri Palu bahwa dari upaya pembuktian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah menghadirkan alat bukti sah kedepan persidangan berupa Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa juga barang bukti, hakim dengan alat bukti yang ada tersebut ditambah dengan keyakinannya juga melakukan upaya pembuktian dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah melihat dan mendengar keterangan saksi-saksi, melihat dan mendengar keterangan terdakwa, Surat dan petunjuk yang ditemukan dan dihadirkan dipersidangan, dan juga setelah hakim melakukan upaya pembuktian dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan terdakwa Hasanuddin Daeng Sikki dan Rikki Daeng Messang atas korban Ansar yang digelar pada Pengadilan Negeri Palu, maka hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.

II. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya Pembuktian Turut Serta Dalam Tindak Pembunuhan.dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu Nomor Perkara 51/Pid.B/2009/PN.PL dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Jo. Pasal 55 KUHP, dilaksanakan dengan menghadirkan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pengajuan barang bukti, dalam persidangan juga majelis hakim menemukan petunjuk-

petunjuk yang menjadi dasar pertimbangannya, pula telah paparkan unsur-unsur Pasal 338 Jo. Pasal 55 KUHP dan mencocokakan rumusan Pasal tersebut sehingga kemudian dengan keyakinannya Majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Hasanuddin Daeng Sikki dan Rikki Daeng Messang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pembunuhan.

2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.telah sesuai menurut aturan-aturan yang terkait tindak pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa Hasanuddin Daeng Sikki dan Rikki Daeng Messang, adanya bukti-bukti yang kuat dimana bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut memberatkan terdakwa, Terpenuhinya unsur unsur tindak pidana dalam KUHPidana Pasal 338 Jo. Pasal 55 KUHPidana tentang tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan bersama-sama yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur Pasal 183 KUHPidana yang mengharuskan hakim mempertimbangkan dua alat bukti yang sah di hadapan persidangan di tambah keyakinan darinya untuk memutus suatu perkara apakah telah terjadi atau tidak terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana tersebut,

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran dan solusi sebagai berikut :

1. Kewajiban bagi Majelis Hakim ketika akan menjatuhkan putusan-putusannya haruslah melalui pemikiran-pemikiran dan pertimbangan yang merujuk kepada 3 (tiga) tujuan utamanya yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya khususnya bagi terdakwa.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kasus tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama serta dapat

memperhitungkan akibat hukum yang ditimbulkan bagi pihak korban dan keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum dari pelaksanaan putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar, H.A.Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, 1990.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta, 1985.
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Wacana Intelektual Press. Jakarta, 2007.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Reffika Aditama, Bandung, 2003.
- Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta, 1983.

BIODATA

MOH. HARYONO, Lahir di Palu, 16 Juni, 1990, Alamat Rumah Jalan Ongka Malino Nomor 14 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281998807875, Alamat Email mohharyono60@yahoo.com

